



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/295/B.03/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/34/B.03/HK/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, perlu disusun perencanaan program penyusunan Peraturan Kepala Daerah, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/34/B.03/HK/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, perubahan dimaksud karena adanya usulan Rancangan Peraturan Gubernur yang urgensi dan belum masuk dalam dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/34/B.03/HK/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/34/B.03/HK/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/34/B.03/HK/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/34/B.03/HK/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/34/B.03/HK/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/34/B.03/HK/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 4 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

The image shows the official seal of the Governor of Lampung, which is circular and contains the text 'GUBERNUR LAMPUNG' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/34/B.03/HK/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2025.**

- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/34/B.03/HK/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/34/B.03/HK/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 4 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/205/B.03/HK/2025
 TANGGAL : 22 - 4 - 2025

**PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 TAHUN 2025**

NO	INSTANSI PENGUSUL	JUDUL PERGUB	MATERI POKOK/DASAR PENYUSUNAN RAPERGUB
I.	Dinas Kesehatan	1. Kawasan Tanpa Rokok	Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
		3. Pengelolaan SDM yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2025	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
II.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Pada Tingkat Provinsi	Tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional
III.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
		2. Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2026	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
		3. Digitalisasi Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE
		4. Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Bandar Lampung atau Metropolitan Lampung Raya (Kotabaru)	Tindaklanjut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kota Baru Lampung
		5. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Tindaklanjut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
		6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

		7. Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	Tindaklanjut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
		8. <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2025-2045	Tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Bab III
		9. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i>	Tindaklanjut Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan (SDGs) 2025 - 2030
		10. Pedoman Penguatan Kohesi Sosial dan Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
IV.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1. Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
		2. Perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
V.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Rencana Induk/Peta Jalan Riset Maupun Inovasi Daerah	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Perangkat Daerah dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Data Kelola RIset dan Inovasi Daerah
VI.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan pada satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
		2. Wajib Kunjungan Museum Bagi Sekolah Secara Tetap Pada Masa Jenjang Pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MAN dan Pondok Pesantren se Provinsi Lampung	Tindaklanjut Gerak Nasional Cinta Museum.
VII.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek	1. Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

		2. Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
VIII.	Biro Administrasi Pembangunan	Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Tahun Anggaran 2025
IX.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jadwal Retensi Arsip	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
X.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Prosedur Serta Sistem Informasi Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan, Produk Hewan, Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan/atau Produk Ternak
XI.	Dinas Perkebunan	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan	Tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kepala Sawit Berkelanjutan Indonesia
XII.	Badan Kepegawaian Daerah	1. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian	Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
		2. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
		3. Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS
		4. Pola Karier Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS
XIII.	Rumah Sakit Jiwa Daerah	1. Pengelolaan Keuangan BLUD RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
		2. Pengadaan Barang dan Jasa BLUD RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
		3. Tata Kelola, Renstra dan SPM RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

		4. Perubahan Atas Pergub Lampung Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan pada RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
		5. Perubahan Atas Pergub Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kerjasama	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
XIV.	Biro Organisasi	1. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
		2. Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
		3. Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah	Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
		4. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
		5. Pemberian Tambahan Penghasilan ASN	Tindaklanjut Keputusan Mendagri 900-4700 Tahun 2020 tentang Tatacara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyusunan APBD 2025
XV.	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan	Tindaklanjut Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat
		2. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah	Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
		3. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pemasaran Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Tindaklanjut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pemasaran Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan
XVI.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Manajemen Data Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
		2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga	Tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

XVII.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
XVIII.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Periode 2025-2029	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kajian Risiko Bencana dan Panduan Penilaian Risiko Bencana
		2. Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem Putting Beliung Provinsi Lampung	Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Nomor dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana
XIX.	Dinas Perhubungan	1. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Lampung	Tindaklanjut UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan
		2. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum di Provinsi Lampung	Tindaklanjut UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan PP Nomor 79 Tahun 2017 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan
		3. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan	Tindaklanjut PP Nomor 89 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan dan PP Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan
		4. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir pada Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut PP Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Instruksi Menteri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi di Bidang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		5. Pelayanan Mobil Daerah dan Penyelenggaraan Pos Pengawasan Lalu Lintas Perbatasan di Provinsi Lampung	Tindaklanjut UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
		6. Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan dan Fasilitasi Lain di Provinsi Lampung	Tindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendalian dan Pengamanan Pengguna Jalan

		7. Pengendalian Lalu Lintas	Tindaklanjut UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		8. Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dan Pelayanan Angkutan Perairan di Provinsi Lampung	Tindaklanjut PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
		9. Pemanfaatan Aplikasi Sektor Perhubungan	Tindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat
XX.	Biro Kesejahteraan Rakyat	Peraturan Pelaksanaan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pesantren	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pesantren
XXI.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tindaklanjut Keputusan Menteri PAN RB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024
XXII.	Biro Hukum	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tindaklanjut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
XXIII.	Biro Perekonomian	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Wahana Raharja Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat	Tindaklanjut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Wahana Raharja Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat

GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

		7. Pengendalian Lalu Lintas	Tindaklanjut UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		8. Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dan Pelayanan Angkutan Perairan di Provinsi Lampung	Tindaklanjut PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
		9. Pemanfaatan Aplikasi Sektor Perhubungan	Tindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat
XX.	Biro Kesejahteraan Rakyat	Peraturan Pelaksanaan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pesantren	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pesantren
XXI.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tindaklanjut Keputusan Menteri PAN RB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024
XXII.	Biro Hukum	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tindaklanjut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
XXIII.	Biro Perekonomian	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Wahana Raharja Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat	Tindaklanjut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Wahana Raharja Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL